



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IX DPR RI**

(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Badan POM,  
BKKBN, PT. Askes (Persero), PT. Jamsostek (Persero), BNP2TKI dan DJSN)

---

Tahun Sidang : 2011-2012  
Masa Persidangan : IV  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Dengan : Menteri Kesehatan RI  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Senin, 9 Juli 2012  
Pukul : 10.00 WIB – selesai  
Acara : Membahas pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011.  
Ketua Rapat : Ir. Soepriyatno/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI  
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1  
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat  
Jumlah Anggota : orang anggota dari 51 Anggota Komisi IX DPR RI

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dimulai pukul 10.30 WIB setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**II. KESIMPULAN**

1. a. Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Kesehatan yang telah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kementerian Kesehatan RI

- a. Pelaksanaan BOK harus diperbaiki terkait petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) BOK
  - b. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui *procurement* tahun 2011 harus dievaluasi secara mendetail sebagai acuan perbaikan di tahun 2012.
  - c. Mengevaluasi program/kegiatan yang kurang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).
  - d. Menindaklanjuti rekomendasi BPK atas laporan keuangan Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2011.
3. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk menyampaikan data sebagai berikut :
- a. rincian realisasi anggaran per eselon I tahun 2011;
  - b. rincian anggaran efisiensi pengadaan barang dan jasa melalui LPSE tahun 2011 sebesar Rp. 481,9 Milyar;
  - c. rincian DIPA yang diblokir sampai akhir tahun 2011;
  - d. rincian DAK Kesehatan tahun 2011;
  - e. rincian alokasi dan distribusi obat generik ke Puskesmas tahun 2011;
  - f. rincian alokasi dan distribusi kepesertaan Jamkesmas dan Jampersal tahun 2011; dan menyerahkan ke Komisi IX DPR RI paling lambat hari Jum'at, 13 Juli 2012.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk terus melakukan upaya-upaya strategis untuk meningkatkan realisasi penyerapan APBN Tahun Anggaran 2012 sehingga Rencana, Kebijakan dan Program (RKP) Kementerian Kesehatan RI dapat terlaksana dengan baik untuk mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.
5. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk segera merealisasikan *roadmap* pemenuhan tempat tidur kelas III, pemenuhan dan penempatan SDM kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan pemutakhiran data masyarakat miskin sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014.
6. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk menetapkan jumlah kepesertaan Program Jamkesmas Tahun 2013 berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial BPS Tahun 2011 yang berada di TNP2K sebesar 96,7 juta jiwa. Jumlah tersebut tidak termasuk peserta Jamkesmas non kartu.